



## Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua<sup>1</sup>

Fred Keith Hutubessy<sup>2</sup> dan Jacob Daan Engel<sup>3</sup>

### Abstraksi

Kajian ini membahas tentang pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta dan persebaran wacana nasionalisme Papua. Situasi problematik Papua pasca integrasi dengan Republik Indonesia telah menjadi perhatian penting bagi dunia internasional. Fenomena kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebelum dan sesudah integrasi dengan Indonesia menjadi keprihatinan bersama, khususnya bagi Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Berbagai aksi yang dilakukan komunitas ini merupakan wujud ekspresi pembebasan sebagai respon atas pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap masyarakat Papua selama ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dilakukan dengan membangun resistensi terhadap konstruksi nasionalisme Indonesia. Hal itu dilakukan komunitas pergerakan melalui pemetaan musuh dalam melakukan perlawanan. Peran kapitalisme, imperialisme dan militerisme diidentifikasi sebagai musuh yang dengan sengaja dibentuk oleh penguasa (pemerintah Indonesia) untuk mendominasi bangsa Papua. Sakralitas sebagai bangsa Papua dianggap sebagai nasionalisme yang sesungguhnya ketimbang yang dikonstruksikan oleh penguasa di Indonesia.

**Kata kunci:** nasionalisme, gerakan mahasiswa, pelanggaran HAM, demokrasi, bangsa Papua/Papua

### Abstract

This study discusses the movement of Papuan Student Alliance in Yogyakarta and the dissemination of the discourse of Papuan nationalism. The problematic human condition in Papua after joining the Republic of Indonesia has become an international attention. The phenomenon of human rights violations prior to and after the integration with Indonesia have become a common concern, especially for the Alliance of Papuan Students in Yogyakarta. Various actions have been carried out by this community as manifestations of expressing democracy and liberation in response to human rights violations in Papua. This study employs qualitative methods through observation. The result of the study shows that the movement of the Papuan Student Alliance has been conducted by building resistance to the Indonesian version of nationalism. To do this, the community members involved in the movement have mapped out common enemy (ies) for their struggle. Capitalism, imperialism and militarism are identified as the enemies that are deliberately formed by the authorities (the Indonesian government) to oppress the Papuan people. Sacrality as being Papuan nation is regarded as a real sense of nationalism rather than the sense of nationalism constructed by the Indonesian ruler.

**Keywords:** nationalism, student movement, human right violations, democracy, Papuans/Papua

### A. Latar Belakang

Kajian ini menjelaskan tentang pola pergerakan sakralitas-nasionalisme Aliansi mahasiswa Papua dalam ruang solidaritas bersama di Yogyakarta. Situasi problematik Papua dengan Indonesia telah berlangsung cukup lama pasca integrasi dengan Indonesia di Tahun 1969. Setelah

kejatuhan Soeharto, aksi massa seakan menyeruak di permukaan publik. Bukan hanya di wilayah Jawa, tetapi juga di Papua. Bedanya, aksi massa di pulau Jawa khususnya di Jakarta sepertinya menyambut dengan sukacita era reformasi atas kejatuhan rezim otoriter yang telah berakhir. Di Papua saat itu, proses kejatuhan Soeharto oleh para elit dan

<sup>1</sup> Untuk kutipan atau sitasi artikel ini: Hutubessy & Engel. 2019. "Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua" *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 6 (1): 77-93

<sup>2</sup> Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Kontak penulis: fredkeith12@gmail.com

<sup>3</sup> Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Kontak penulis: fteo@admin.uksw.edu

masyarakat lokal Papua dimanfaatkan dengan melakukan strategi pergerakan dalam upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjojo dkk, 2009 : 155-159).

Kekuatan mobilisasi dalam bentuk aksi massa bukan dengan tanpa tujuan. Di masa sekarang, pergerakan mahasiswa Papua di kota-kota studi diluar Papua tampaknya semakin massif. Beberapa laporan media cetak menyatakan aksi mahasiswa Papua yang secara fundamental menyuarakan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan meminta untuk melakukan referendum sebagai bentuk sikap pemisahan diri dari Indonesia (Lihat: <https://tirto.id/aliansi-mahasiswa-tuntut-papua-bebas-dari-kolonialisme-indonesia-cNlm>)

Pada kenyataannya, upaya penanganannya selalu disikapi dengan tindakan represif oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi permasalahan terkait kebebasan hidup orang Papua dan bukan sekedar masalah klasik yang sudah lazim terjadi di Papua, tetapi juga di luar Papua. Dari penjelasan di atas pula, masalah krusial yang tak pernah selesai khususnya adalah nasionalisme dalam diri orang Papua yang dianggap memiliki "nasionalisme ganda" (Meteray, 2012). Namun demikian, persoalannya tidak pernah selesai, karena akar permasalahan dari timbulnya berbagai konflik sosial dan penyangkalan diri terhadap Indonesia dari orang Papua yang tidak pernah diketahui alasan-alasan rilnya dalam sejarah sampai saat ini, karena kompleksitas masalah dalam memahami Papua.

Padahal salah satunya menurut Bilveer Singh, (Singh, 2008 : 22-26) dalam penelitiannya

tentang 'Geopolitics and the quest for Nationhood, sense of difference' , munculnya perasaan berbeda terjadi akibat perjumpaan-perjumpaan dengan orang non-Papua misalnya Belanda, pendudukan Jepang, dan perjumpaan dengan orang-orang Indonesia di luar dari diri orang asli Papua dalam konteks sejarahnya sehingga muncul tindakan pro kontra dan penyangkalan diri terhadap eksistensi Papua sebagai bagian dari Indonesia yang didukung oleh beragam peristiwa yang turut membentuk kompleksitas masalah. Akibatnya, kompleksitas masalah itu menjadi bentuk persaingan dan memori pahit terhadap tindak kekerasan dan konflik berdarah yang terjadi sampai saat ini (Yoman, 2007 : 188). Bentuk Nasionalisme semacam ini menurut Drooglever (2010) dianggap sebagai kegagalan Indonesia dalam membangun konstruksi rasa nasionalisme bagi bangsa Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Meteray (2012) menemukan bahwa "nasionalisme ganda" orang Papua adalah bagian dari Indonesia dan justru merupakan bagian yang khas dari Papua sendiri dalam konteks sejarahnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryawan (2013) juga menemukan bahwa adanya fakta Papua pernah dibentuk sebagai negara merdeka secara *de Facto* tetapi kemudian karena persoalan konspirasi kepentingan geopolitik antara Indonesia, Amerika, Belanda, dan Australia maka integrasi dilakukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Drooglever (2010) yakni Papua masuk ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan 'paksaan'. Padahal nasionalisme menurut Gellner dan Eriksen (dalam Meteray, 2012: 259) adalah suatu produk

ideologi suatu negara moderen. Namun, ide tersebut berasal dari sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dan Ras. Selain itu karena adanya kesamaan nasib tertekan atau ditindas dalam berbagai bentuk termasuk kekerasan (Yoman, 2007) sehingga mereka berjuang untuk mendapatkan kebebasannya melalui ideologi nasionalismenya (Karma, 2014).

Terkait aspek pergerakan mahasiswa Papua, Corputty (2007) dalam kajiannya menemukan bahwa Aliansi Mahasiswa Papua memanfaatkan primordialisme, kontekstual dan media massa untuk mengembangkan isu referendum dan juga organisasi ini menjadi wadah yang menyatukan seluruh elemen pergerakan. Ia juga menjelaskan bahwa gerakan perjuangan yang melibatkan penyatuan berbagai kelompok, yang dibangun oleh mereka seperti sebuah 'mazhab bersama' selalu menuntut adanya kemampuan kelompok untuk memengaruhi suatu gerakan perlawanan. Ketidakmampuan dalam memperjuangkan ideologinya adalah fakta 'kekalahannya' dalam proses pertarungan merebut 'mazhab bersama' sebagai akses politiknya, baik di tingkat kelompok-kelompok gerakan mahasiswa, maupun pada level elit-elit Papua. Pamuji (2018) menemukan bahwa nasionalisme Papua yang diseminasikan oleh Aliansi Mahasiswa Papua adalah hal yang baru dan tersemai ketika terjadi interaksi di dalam komunitas ini. Salah satu hal penting yang ditemukannya juga menjelaskan bahwa kekerasan dan perampasan lahan serta eksploitasi sumber daya alam Papua telah menyebabkan gerakan ini semakin masif.

Oleh karenanya, konteks sejarah Papua melalui pergerakan mahasiswa yang membentuk

rasa nasionalisme Papua harus dipandang sebagai pokok utama yang turut membentuk nasionalisme Papua, tanpa memungkirkan hasil-hasil penelitian tentang kompleksitas permasalahan bangsa Papua dan di Papua yang telah dibahas sebelumnya (Drooglever 2010; Osborne, 2001; Meteray, 2012; Suryawan, 2013 ; Corputty, 2007 ; Pamuji, 2018). Sejauh yang diketahui, dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas dari konteks sejarah dan masalah penderitaan bersama dalam membentuk pergerakan mahasiswa Papua. Sementara itu, kajian yang mengedepankan aspek hak asasi manusia (HAM) dan perjuangan demokrasi dalam pergerakan mahasiswa Papua dalam penelitian sebelumnya, belum dikaji secara mendalam sebagai bagian yang integral dan berperan dalam memahami pembentukan rasa nasionalisme Papua di kalangan mahasiswa Papua khususnya dan melalui pola pergerakannya. Karena ternyata, situasi tersebut berkaitan erat dengan pergerakan dan perjuangan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam bingkai kemanusiaan sebagai bentuk perlawanan terhadap konflik yang berkepanjangan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan mereka ingin bebas, dalam arti yang luas dengan menghidupi nilai-nilai sakral dalam kehidupan mereka. Sejatinya, hal ini telah menghasilkan sakralitas-nasionalisme dalam diri mereka. Suatu nilai sakral sebagai bangsa atau orang Papua yang berbeda dengan Indonesia.

Artikel ini membahas lebih mendalam tentang pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua dalam ruang solidaritas Aliansi mahasiswa Papua di Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk mengajak pembaca menemukan motif pergerakan mahasiswa

Papua dan pergerakan sakralitas-nasionalisme yang tumbuh dalam diri mereka.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan pengalaman dalam menemukan data. Cara-cara yang digunakan seperti observasi, wawancara secara individu dan melalui pendekatan focus group discussion, serta ditunjang juga oleh beberapa literatur berupa buku-buku dan jurnal-jurnal Papua serta laporan dari berbagai media. Sumber wawancara telah diperoleh dari sejumlah mahasiswa Papua yang melakukan aksi di kota Yogyakarta. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari kelompok Aliansi Mahasiswa Papua. Kelebihan pendekatan ini, secara langsung telah membangun hubungan kedekatan antara peneliti dengan partisipan, sehingga membentuk relasi yang tidak sebatas kepentingan penelitian, tetapi juga dapat membangun hubungan jangka panjang yang secara substansi dapat menjaga keamanan dan keaslian data (Creswell, 2010).

Studi ini juga telah memfokuskan kepada identifikasi, deskripsi dan interpretasi data dan analisa kritis ditemukan dengan membandingkan relevansi antara teori dan data, sehingga menghasilkan temuan dalam narasi motif pergerakan mahasiswa Papua dan penyemaian nasionalismenya.

## C. Temuan dan Pembahasan: Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dan Perjuangan HAM

Suatu pergerakan yang melibatkan aksi massa mengisyaratkan sebuah kepentingan. Persoalan lainnya ketika dikaji dengan menggunakan perspektif antar komunitas yang berkonflik, akan menghasilkan akumulasi dari masing-masing kepentingan dalam posisi negatif dan posisi positif. Akumulasi kepentingan yang tidak terpenuhi, menyebabkan protes dilakukan. Pada pokok pergerakan, hal paling fundamental dari massa secara kolektif diupayakan untuk memenuhi kepentingannya. Aksi protes jika dijelaskan dari kajian studi-studi gerakan sosial salah satunya menurut Tilly (1986), protes selalu digunakan oleh para aktivis pergerakan sebagai bagian dari tuntutan dalam perjuangan. Merujuk ide Tilly, bagi Hiarij (2010 : 135), protes merupakan metode yang tidak lazim dan juga keabsahannya dapat dipertanyakan sebagai bentuk yang memengaruhi dan mempertahankan hubungan kekuasaan dalam kelembagaan. Aksi-aksi yang terdapat dalam gerakan sosial jika dibenturkan dengan kelembagaan secara terstruktur misalnya negara, tentunya menghambat kebijakan struktural yang juga tidak terlepas dari kepentingan. Namun, dipihak lain merupakan sebuah impian untuk melakukan transformasi secara struktural yang tentunya jika dikaji lebih mendalam akan menemukan pertautan kepentingan untuk mendapatkan *status quo*.

Kajian ini juga membahas aksi gerakan mahasiswa Papua yang melibatkan bentuk protes seperti yang dikemukakan di atas. Penyebabnya, tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang meliputi ; nasionalisme yang berbeda, kekerasan yang

berakibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa Papua, serta ketimpangan sosial pasca integrasi dengan Indonesia (Drooglever, 2010; Osborne, 2001; Meteray, 2012 ; Hutubessy, 2018). Hal demikian telah menjadi tema besar dalam pokok perjuangan. Bagian dari tema besar ini kemudian digunakan sebagai legitimasi bahwa, aspek kemanusiaan penting untuk diperjuangkan melalui aksi protes dalam perjuangan mereka, meskipun dalam kenyataannya sarat dengan pertautan kepentingan. Menurut (Wonda, 2007), integrasi Papua ke Indonesia adalah awal kekerasan terhadap bangsa Papua. Faktanya, integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perjanjian New York yang diimplementasikan dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di tahun 1969 yang bersifat represif dan sarat akan kepentingan (Lihat Osborne, 2001 ; Drooglever 2010).

Pasca bergabung dengan Indonesia, gerakan-gerakan perlawanan yang mempresentasikan identitas semakin masif melakukan protes terhadap proses integrasi dengan Indonesia. Pada masa itu, pengibaran bendera 'Bintang Kejora' dilakukan sebagai bentuk protes dan sebagai penanda identitas kelompok gerakan. Bendera ini merupakan lambang negara Papua yang secara *de facto* pernah dibentuk dalam manifesto politik *Nieuw Guinea Raad* di tahun 1961. *Nieuw Guinea Raad* adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk representasi rakyat Papua dalam Pemerintahan. Dewan ini hadir untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Papua. Secara langsung, tampak pertautan ekspresi identitas

simbol telah menegaskan identitas berbeda dengan Indonesia secara nyata di ruang publik.

Di masa kini, pokok pergerakan mahasiswa Papua di sejumlah kota studi khususnya di Yogyakarta tampaknya memiliki gaya dan semangat yang sama seperti aksi massa di awal bergabung dengan Indonesia. Kesamaannya tampak dalam aksi protes yang dilakukan secara taktis dan masif dengan menggunakan atribut bendera Bintang Kejora . Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran tentang permasalahan yang telah terjadi di Papua pasca bergabung dengan Indonesia seperti pola pergerakan yang dahulu dilakukan (Djopari, 1993). Namun, hal yang membedakan adalah stigma dan stereotipe atas pergerakan yang kian masif sehingga berbeda dengan pergerakan di masa lalu. Stigma dan sterotipe tentang agenda separatisme mahasiswa Papua di kota-kota studi secara khusus justru semakin memperkuat motivasi pergerakan sehingga membedakannya dengan gerakan mahasiswa Papua sebelumnya. Griapon (2018) menjelaskan bahwa telah terjadi indoktrinasi di publik luas di Indonesia yang meneguhkan stigma negatif tentang gerakan mahasiswa Papua kini. Pembohongan publik besar-besaran misalnya disebarkan tentang pengetahuan sejarah Papua menurut versi kekuasaan. Stigma buruk bahkan membuat sebagian orang Indonesia menganggap orang Papua itu "primitif" sehingga pemahaman semacam itu terstruktur dan dibangun untuk mengucilkan orang Papua. Dampaknya, setiap akan membuat kegiatan, maka acapkali distigma sebagai kegiatan yang tidak jelas orientasinya. Misalnya macam orientasi kegiatan *kelompok separatislah*,

*kriminal kah, ormas kah*, juga sengaja dikondisikan untuk itu wacananya ke publik di Indonesia.

Semangat kesadaran berbeda direspon oleh pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dengan menyuarakan permasalahan dalam tema besar hak asasi manusia, dan dalam tuntutan mereka meminta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Organisasi ini awalnya dibentuk oleh mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogyakarta dan kemudian secara sah didirikan 30 Mei 1998 di Jakarta. Aliansi Mahasiswa Papua berorientasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua (Pamuji, 2018). Pokok pergerakannya sampai saat ini, mereka telah melakukan pemetaan musuh bersama. Musuh bersama Aliansi Mahasiswa Papua oleh Douw (2018) dikatakan:

Kalau secara umum terutama soal aksi masa itu sendiri, boleh di bilang mulai tahun 1998 gerakan massa mulai bangkit di Indonesia, kawan-kawan mulai membentuk gerakan mahasiswa. Di sana metode perjuangan yang teman-teman dorong itu terutama aksi massa. Aksi-aksi dengan kekuatan mobilisasi massa. Awal yang mendorong itu terutama kesadaran kawan-kawan untuk memetakan siapa musuh sebenarnya. Misalnya AMP telah petakan soal imperialisme, awal munculnya imperialisme, sampai mendorong kolonialisme dan juga militerisme yang telah bertahun-tahun telah menghisap rakyat Papua dan alam Papua.



Foto: Aksi Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta menggunakan atribut bendera Bintang Kejora (Sumber: Koran Suara Kolaitaga Papua – situs online <http://suarakolaitaga.blogspot.com> – diblokir Kominfo sejak 1 Januari 2019)

Pada dasarnya, mereka berpendapat bahwa dengan memetakan musuh bersama dapat memberikan pemahaman secara komunal, khususnya kepada masyarakat Papua agar dapat memahami kebutuhan penting mereka selama ini. Masyarakat Papua memiliki kebutuhan khusus yakni demokrasi. Kebutuhan demokrasi mengharuskan masyarakat Papua untuk hidup sejahtera dan bebas untuk memilih hak dalam hidupnya, Namun selama ini demokrasi telah dibungkam (Griapon, 2018). Musuh bersama yang telah dipetakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua, menyiratkan dua hal penting yang saling bertautan. Pertama, dampak kapitalisme kepada orang Papua dalam sejarah perkembangannya telah menghasilkan imperialisme. Struktur kapitalis yang dominan telah berakumulasi dengan kekuatan-kekuatan besar dan dilindungi oleh aparat keamanan untuk mengamankan kepentingan

penguasa (Griapon, 2018). Kedua, dampak Kapitalisme, Imperialisme dan Militerisme di masa lalu dan sekarang telah menghilangkan Hak asasi manusia (HAM) Papua (lih, Supriyono, 2014; Widjojo dkk, 2009 ; Rahab, 2006).

Konsep kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari kritik Karl Marx. Baginya, kapitalisme bukan merupakan respon dari aspek situasi politik, namun aspek ekonomi yang merupakan faktor utama dalam membentuk sistem kapitalisme (Bahari, 2010: 6). Sistem ekonomi merupakan dasar yang menyebabkan kepentingan dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui sistem produksi. Selanjutnya hasil dari keuntungan yang didapatkan hanya dimiliki oleh sebagian pihak , yakni pemilik modal. Menurutnya, sistem kapitalisme menyebabkan alienasi atau keterasingan antara para pekerja (proletar) dan kaum Borjuis (pemilik modal). Kerugian yang dialami oleh para pekerja ialah hasil dari pembagian jam kerja yang tidak sesuai dan harga produksi yang telah ditentukan oleh pemilik modal menyebabkan dominasi non konsensus kepada para proletarian (Bahari, 2010 : 7).

Ide yang dikembangkan oleh Marx sejatinya memiliki perbedaan konteks mendasar dalam kondisi kapitalisme di Papua. Perbedaannya, konteks Papua tidak melibatkan kelas pekerja secara langsung, tetapi melibatkan pemilik sumber daya alam. Aspek ekonomi merupakan salah satu penyebabnya, namun tidak dapat diingkari bahwa permasalahan Papua juga berkaitan pula dengan aspek politik yang dalam pandangan kapitalisme Marx mengingkarinya. Senis (2013: 44) dalam penelitiannya menemukan bahwa kontrak karya

Freeport McMoran merupakan tolak awal kapitalisme ekonomi di Papua. Eksploitasi sumber daya alam berupa kekayaan tambang, hutan, laut telah dikelola sedemikian rupa dan dikuasai oleh pemilik modal dan elit politik untung mendapatkan keuntungan. Mengingat aspek politik yakni negara memainkan peranan sentral terkait eksistensi Freeport McMoran di Indonesia dan berakibat kepada sejumlah pelanggaran HAM berat di Papua (Benny Giay dan Yafet Kambai, 2003 : 41). Pada akhirnya, posisi kapitalisme di Papua berdampak pada kondisi diabaikannya hak asasi manusia (HAM).

Aristoteles sebelumnya telah memberikan konsep bernegara atas dasar hukum. Baginya, negara seharusnya menjamin kehidupan bernegara untuk mencapai keadilan atas nama hukum, termasuk hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warganya. Pemikir barat salah satunya John Locke telah menjelaskan bahwa Hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah konsep pemberian yang secara alami. Menurutnya, *God is the author of the natural law*. Ia mengakui bahwa keberadaan Tuhan menjadikan hak ini perlu diakui secara moral dan semuanya berasal dari Tuhan. Baginya, negara harus memiliki peranan penting dalam melindungi kepentingan manusia sebagai warga negara (Locke, 1959: 69-70). Berbeda dengan Locke, posisi hak asasi manusia (HAM) menurut Hannah Arendt (1962) bersifat paradoks dan tidak berarti apa-apa tanpa adanya komunitas yang mewartakan. Manusia pada hakekatnya memiliki hak asasi, namun pada kenyataannya mereka tidak memiliki hak dalam mendapatkan haknya. Pemikiran Arendt dipengaruhi oleh posisinya sebagai penganut

Republikanisme yang cenderung memandang struktur komunitas memengaruhi pola eksistensi di ruang publik. Ia cenderung mengkritisi pemikir dahulu seperti John Locke, Thomas Hobbes dan Immanuel Kant (Hardiman, 2011: 26-29) dengan mendasarkan kepada ide abstrak yang dikembangkan mereka dalam ruang liberal. menurutnya, kebebasan hak asasi hanya bersifat individu-individu yang berjuang tanpa wadah alasan adi kodrati. Sementara itu, kebangkitan liberalisme yang diawali oleh individu-individu yang sadar kebebasan dan mencoba melawan tirani kekuasaan pada konteks abad ke 17 hanya bersifat pra politis. Baginya, tanpa negara, tidak ada hak yang bisa dilindungi.

Konteks Indonesia dimungkinkan berkorelasi dalam ide besar Arendt yang menjunjung tinggi hukum sebagai cita-cita bersama untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya termasuk hak asasi manusia (HAM). Secara legal, Indonesia turut serta menjamin kehidupan hak asasi manusia-manusianya. Sebelumnya di awal reformasi, pemerintah melegalkan Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2009 dan sebelumnya No 29 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia (HAM) dan pengadilannya. Tujuannya, untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Indonesia, khususnya di masa Orde Baru (Winandi, 2009). Meskipun demikian, apa yang telah diupayakan melalui undang-undang ini belum secara signifikan menjamin hak asasi warganya khususnya dalam konteks Papua (Sitepu, 2017). Pada akhirnya, negara kemudian dianggap belum mampu untuk melindungi hak asasi warganya.

Permasalahan ini dalam perkembangannya telah mendorong kesadaran Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk memperjuangkan hak yang selama ini belum dirasakan dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, aksi mereka semakin masif hingga kini.

Penelitian menemukan bahwa sifat pokok pergerakan mereka yakni nilai kemanusiaan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) telah berkembang dan tidak lagi bersifat eksklusif. Oleh karena itu, berbeda dengan temuan sebelumnya. Corputty (2007) menjelaskan bahwa pola perjuangan bangsa Papua cenderung bersifat primodialisme. Namun dalam perkembangannya kini yang ditemukan pergerakannya justru lebih bersifat inklusif komunal. Menurut Douw (2018), permasalahan yang dihadapi dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Papua bukan persoalan suku dan ras, namun justru melawan sistem yang menghisap kemanusiaan sehingga gerakan mahasiswa Papua juga turut serta berafiliasi dengan gerakan-gerakan pro-demokrasi lainnya yang mendukung ruang demokrasi sebagai isu bersama.

Bagi orang Papua, musuh sebenarnya bukan persoalan karena seseorang itu adalah ras Melayu, atau suku Jawa, suku Makassar, suku Batak dan sebagainya, tapi suatu sistem yang menghisap dan meniadakan eksistensi kemanusiaan bangsa Papua. Keadaan itu mendorong anggota komunitas dalam Aliansi Mahasiswa Papua untuk melawan rezim penguasa, sekaligus merangkul massa yang lebih luas sebagai bentuk menyadarkan publik di Indonesia bahwa sebenarnya musuh bagi bangsa Papua bukanlah orang, etnis atau suku-suku lainnya di Indonesia. Keterlibatan jaringan ini membuahkan



hasil dengan bergabungnya komunitas lain yang cair, seperti komunitas mahasiswa Yogyakarta di Kulonprogo dan Cemara Sewu.

Pro-demokrasi pada hak ekatnya bukan merupakan sebuah gerakan. Pro-demokrasi adalah sebuah istilah yang diberikan kepada individu dan organisasi paten maupun taktis yang memiliki kesadaran demokrasi untuk berjuang di ruang publik. Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta merupakan bagian dari pro-demokrasi terkait isu-isu HAM dan demokrasi yang sering diperjuangkan (Mofu, 2019). Namun pengertian tentang pro-demokrasi dapat diidentifikasi sebagai sebuah kelompok gerakan apabila diamati dari pola pergerakan di lapangan. Artinya, ketika kelompok-kelompok yang bergabung dan melakukan aksi bersama dalam label tersebut, maka pro-demokrasi bukan lagi sebagai label ideologi, namun merupakan gerakan komunal yang bersifat taktis. Ada dua temuan penting dari bergabungnya Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta dengan beberapa organisasi lainnya di bawah payung label pro-demokrasi.

Pertama, nilai perjuangan bersama tantang ruang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Papua secara khusus dan yang lainnya seperti kebutuhan masyarakat di Yogyakarta dapat diperjuangkan. Hal ini dibuktikan oleh pandangan aktivis Ernawati dari gerakan pro-demokrasi:

“Papua ini persoalan internasional. Orang Papua yang merasa ditindas ingin merdeka. Tapi kalau Papua merdeka, ada yang senang karena bisa lebih mudah menjarah sumber daya alam Papua” (Berita CNN, 2016).

Aktivis Papua Roy Karoba menganggap :

“Masyarakat Yogya sama seperti kami di Papua, banyak yang tertindas. Pemerintah lebih mementingkan perusahaan ketimbang rakyatnya sendiri. Kasus seperti itu terlihat pada petani di Kulon Progo dan Parangkusumo. Tindakan kami tidak mengancam secara fisik. Kami melakukan aksi damai, bukan angkat senjata. Yang harus dicermati adalah isu yang kami bawa: kebebasan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Kami menuntut solusi negara Indonesia yang mengaku demokratis ini untuk berbagai problem di Papua,” (Ibid).

Kedua, nilai perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta cenderung bersifat oportunistik dengan mencari peluang untuk memperkuat basis massa melalui isu bersama. Hal lainnya, dengan bergabungnya AMP dalam koalisi besar pro-demokrasi secara sadar telah menjadikan isu Papua menjadi kuat dan masif. Dalam wawancara dengan peneliti (Januari 2019), aktivis Papua, Mofu, mengatakan :

“Dalam beberapa kesempatan, teman-teman dari pro demokrasi seringkali membuka ruang dengan mengajak untuk melakukan aksi bersama. Sa (saya) kira ini respon yang cukup baik.”

Peneliti memandang, koalisi dalam pro-demokrasi telah terfragmentasi dalam memahami isu Papua. Merujuk kepada pandangan Ernawati dan Roy di atas, tampaknya saling bertentangan dan mengalami kerapuhan dalam aspek konsensus terhadap Papua untuk menentukan nasib sendiri (merdeka) sebagai solusi yang selama ini selalu menjadi tuntutan oleh Aliansi Mahasiswa Papua . Kerapuhan yang terjadi tertutupi oleh isu bersama

hak asasi manusia (HAM) yang masih terus diperjuangkan dalam ranah kawan bersama yang telah dibangun.

Propaganda melalui sistem pendidikan kepada masyarakat menurut Griapon (2018) adalah penyebabnya. Entah itu orang Indonesia dan Papua, ada yang mau terlibat dalam pergerakan, tetapi ada yang tidak. Diantara mereka yang ikut pergerakan ada yang hanya berfokus pada isu pelanggaran HAM saja, ada juga yang mengharuskan anggota komunitas untuk isu kemerdekaan bangsa Papua, dan lain sebagainya. Kondisi semacam itu membuktikan adanya propaganda yang dipelihara oleh kelas penguasa (elit) sehingga membuat mereka tidak dapat dikritik untuk menjadi yang lebih baik.

Pada akhirnya, meskipun banyaknya tantangan berupa agitasi dan propaganda dalam pola pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta, namun konsep ke-kita-an bersifat primordialisme sebagaimana yang diungkapkan oleh Corputty (2007) bukan merupakan ideologi mereka saat ini. Mereka memilih untuk mengelola simpatisan massa dalam pergerakan yang anti rasisme. Kesadaran demokrasi dan pemetaan musuh bersama telah menyemai dalam pokok pergerakan. Pada perkembangannya juga, mereka turut peduli dengan kaum marginal lainnya dalam isu HAM di Yogyakarta. Alasan senasib, menjadikan nilai kemanusiaan dalam pokok pergerakan mereka memiliki posisi tawar. Pokok pergerakan hak asasi manusia (HAM) yang diupayakan, telah menjadikan gerakan ini memiliki karakteristik yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Sejatinya, masifnya pergerakan mereka diawali hilangnya hak asasi manusia (HAM) akibat situasi konflik kekerasan yang dialami oleh mereka seperti kekerasan struktural, kekerasan simbolik, kekerasan fisik. Akumulasinya bertambah dengan ingatan sejarah masa lalu yang telah membentuk rasa nasionalisme yang berbeda dengan yang dikonstruksikan oleh penguasa di Indonesia. Akhirnya, mereka menuntut pelurusan pelanggaran HAM kepada pemerintah dan sekaligus melakukan pola penyadaran kepada masyarakat terkait hak mereka yang telah dirampas melalui sejumlah aksi massa di Yogyakarta.

Selanjutnya, dengan bergabungnya mereka ke dalam koalisi bersama pro-demokrasi, telah berdampak signifikan dalam pergerakan melalui label kemanusiaan. Namun, nilai kemanusiaan yang diupayakan bersama dalam koalisi ini memiliki tantangan. Salah satunya ialah meyakinkan ideologi perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui kemerdekaan dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuatu isu yang masih belum diterima oleh beberapa anggota komunitas lainnya dari gerakan pro-demokrasi di Indonesia.

#### **D. Analisis Kritis: Persemaian Sakralitas Nasionalisme Bangsa Papua**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta bukan dengan tanpa alasan. Namun tersirat pertanyaan lain, sebenarnya nasionalisme macam apa yang berakar dalam diri mereka? Nasionalisme Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan integrasi, ataukah nasionalisme yang berbeda

dengan warga negara Indonesia lainnya? Mengingat ada dua hal penting dalam konteks nasionalisme disana. Pertama, telah cukup lama Papua bergabung dengan Indonesia. Kedua, telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Papua melalui berbagai kebijakan afirmatif salah satunya Otonomi Khusus. Demikianlah dalam pembahasan ini akan dibahas hubungan antara nasionalisme yang berkembang di dalam diri orang atau bangsa Papua dan hak asasi manusia (HAM) yang telah dibahas sebelumnya. Kajian sejarah, antropologi, dan politik cukup berperan penting dalam menjelaskan terbentuknya sakralitas-nasionalisme Papua.

Konteks sejarah Papua menarasikan hal yang menarik dalam persentuhannya dengan dunia luar, khususnya berkaitan dengan kepercayaan yang niscaya membangun konsep kehidupan Papua hari ini. *Cargo cult* atau *kargoisme* merupakan kepercayaan pribumi yang berkembang di wilayah Melanesia. Narasi dogmatis dalam kepercayaan ini, menyakralkan seorang sosok yang dipercayai akan membawa kebahagiaan dan kedamaian (*messianistic*). Sebut saja misalnya, kepercayaan *Kuri* dan *Pasai*, kepercayaan *Manarmakeri*, kepercayaan *Hai*, dan lain sebagainya (Suabey, 2017; Kamma, 1972; Suryawan, 2017) terdapat dalam kultus kargo ini. Menurut Benny Giay (dalam Suryawan, 2017) menyoroti pertentangan antara "Teologi Pribumi Papua dan Kekristenan". Menurutnya, dogma kekristenan cukup memengaruhi subjektivitas berpikir komunitas Kristen di Papua bahwa, "kegelapan" berasal dari kepercayaan pribumi dan Kekristenan telah datang membawa "terang" menuju peradaban. Dampaknya

menurut Giay (Suryawan 2017), tidak sedikit komunitas-komunitas Teologi Pribumi yang dipenjarakan, dibakar rumahnya dan mengalami kekerasan simbolik yang mengancam psikologi mereka.

Peran Kekristenan saat itu terjadi karena identitas Kekristenan disebarkan melalui peran *Zending* (pekabar injil). Persentuhan antara Teologi Pribumi dan peran *Zending* justru telah membentuk "sakralitas-nasionalisme Papua dengan menggabungkan nilai kedua nilai ini (Hutubessy, 2016). Meskipun di dalam pergerakannya, terkandung hegemoni politik bersifat mutualistik yang hingga saat ini masih dihidupi dan dihidupkan oleh orang Papua, khususnya Aliansi Mahasiswa Papua melalui pergerakannya. Untuk memahaminya lebih jauh, ada tiga fase penting dalam pembentukan, konstruksi dan persemaian nasionalisme orang Papua.

Pertama, fase hibriditas antara mitologi pribumi dan Injil. Fase ini merupakan awal sebagai landasan kuat sakralitas-nasionalisme Papua. Kajian Meteray (2012) dan Singh (2008) menemukan bahwa Izaak Samuel Kijne dan Jan Pieter Karl Van Eechoud adalah para *Zending* yang telah menumbuhkan semangat nasionalisme orang Papua. Sementara itu, terdapat perbedaan yang mendasar dari proporsi kerja mereka yang berpengaruh kepada dominannya pola penyemaian ini. Van Eechoud menyemaikan nasionalisme di bidang pemerintahan, sedangkan Kijne melakukan pendekatan yang mendasar secara Teologis melalui pendidikan (Awom, 2012).

Menurut peneliti, dibandingkan Van Eechoud, Kijne lebih dominan memberikan

sentuhan nasionalisme, meskipun dalam pandangan sebelumnya mengatakan tidak demikian. Mengapa? Kijne membangun basis rasa bersama non subjektif melalui sekolah peradaban. Sekolah ini didesain dan dikonstruksikan untuk semua orang Papua yang datang dari Mansinam ke Miei (Wanma, 2016: 27-29). Hutubessy (2013) menemukan bahwa Kijne melakukan hibriditas terhadap Teologi pribumi dan Teologi Kristen melalui tiga hal penting, yakni injil, pendidikan dan peradaban. Meskipun Injil menggambarkan subjektivitas Kristen, namun inti dari produk injil memiliki nilai kasih yang berlaku universal. Kemudian, kasih ini diimplementasikan melalui pendidikan yang bersifat kultural dengan memanfaatkan hasil alam sebagai konsumsi bersama dan membuat pola keteraturan dalam lingkup pendidikan (Onim, 2004). Kemudian, hasil dari hibriditas ini, telah menghasilkan banyak kualitas dan kuantitas didikan sebagai cita-cita Zending untuk membentuk sebuah peradaban bagi bangsa Papua.

Teologi Pribumi sebelum kedatangan Kijne di Miei memiliki kepercayaan mitologi kepada sebuah batu yang terletak di kaki bukit Aitumieri. Batu besar itu dipercayai orang Maniwak dapat memberikan kemenangan saat berperang dengan melakukan ritual di atasnya. Sesampainya ia di Miei, ia pergi ke batu itu dan berdoa. Kemudian, dalam doanya di tanggal 25 Oktober malam itu, ia mengatakan sebuah kalimat yang populer saat dan dipercayai sebagai nubuatan kepada bangsa Papua:

“Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”(Hutubessy F. K., 2013).

Wanma (2011) menjelaskan secara subjektif konteks batu ini dalam perspektif ajaran Kristen. Dalam bukunya, ia menghubungkan beberapa tokoh Alkitab yang menggunakan media batu yang ditafsirkan sebagai penanda dalam kepercayaan kekristenan. Pada persepektif ini, Kijne tidak menghilangkan salah satu dari nilai teologi ini, namun justru melakukan hibridisasi. Filosofi makna “kemenangan” orang Maniwak melalui batu tersebut, juga dikembangkannya dalam makna nilai yang sama, yakni kemenangan bagi orang Papua saat itu. Implementasi nilai kasih dalam injil, bertransisi melalui pendidikan sehingga menghasilkan peradaban Papua untuk bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa hibriditas antara kedua pendekatan teologi ini bersifat hegemoni namun mengandung sifat mutualistik. Namun, ruang hibriditas, telah membentuk memori kolektif yang dalam perkembangannya menurut (Hutubessy 2013), merupakan awal dari pembentukan spirit pembebasan yang menghasilkan Sakralitas-Nasionalisme Papua dan oleh pandangan (Suryawan 2017) telah menghasilkan gerakan keagamaan baru dalam situasi politik Papua saat ini.

Fase Kedua, merupakan masa transisi. Mengapa demikian? Hal ini merupakan bagian dari fase peralihan nilai yang abstrak kepada implementasi tindakan yang nyata. Ingatan tentang mitologi pribumi bersifat abstrak diimplementasikan oleh aksi murid-murid Kijne dalam mempersiapkan sebuah negara Papua di Tahun 1961 dengan landasan produk Nasionalisme yang telah tersemayem dalam diri mereka. Fase transisi

ini menurut Hutubessy (2016) diawali dengan pembentukan *Nieuw Guinea Raad*, yang beberapa di dalamnya terdapat murid-murid hasil didikan Kijne di sekolah peradaban. Beberapa murid-murid Kijne yang memilih jalur pemerintahan, berjumpa pula dengan Van Eechoud dalam sekolah Bestuur (Meteray, 2012 : 135). Tugas mereka ialah membuat manifesto politik yang di dalamnya terdapat ketiga unsur penting untuk mendirikan sebuah negara *Nederlands Nieuw Guinea* yaitu, Bendera Bintang Kejora, simbol burung mambruk, dan lagu *Hai, Tanahku Papua* sebagai lagu kebangsaan (Suryawan, 2013). Manifesto politik ini memiliki entitas yang sakral. Misalnya menurut Hutubessy, (2016), simbol bintang di dalam bendera Bintang Kejora diadopsi dari mitologi *Manarmakeri* (Nonie Sharp, Markus Wonggor Kaisiepo, 1994; Kamma, 1972) yang merupakan tradisi *cargo cult* masyarakat Biak yang di dalamnya bermakna kehidupan yang penuh dengan kedamaian (*korer*).

Selanjutnya, entitas burung *Mambruk* sebagai lambang negara juga memiliki filosofi keteraturan. Hal ini ditemukan dalam cara Mambruk untuk bertahan hidup secara teratur. Oleh karenanya, nilai ini yang diharapkan oleh *Nieuw Guinea Raad* kepada orang Papua sebagai bagian dari imajinasi sebagai sebuah negara merdeka. Sedangkan yang terakhir, lagu *Hai Tanahku Papua* sebagai lagu kebangsaan merupakan lagu karangan Izaak Samuel Kijne. Nilai dari syair lagu ini memiliki filosofi untuk mengajarkan orang Papua agar mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena alam yang berlimpah, dan juga memohon tuntunan Tuhan untuk menuntun dan mengajarkan orang Papua untuk selalu rajin dalam menyampaikan maksud

Tuhan. Lagu ini terdapat pada buku nyanyian seruling emas nomor dua. Pada tradisinya, nyanyian ini dikumandangkan pada saat peribadatan di Gereja (Hutubessy, 2016).

Pola nasionalisme dalam fase transisi juga menggunakan metode hibriditas teologis, seperti pola pada fase pertama. Mengapa demikian? Manifesto politik yang di dalamnya terdapat ketiga makna yang berbeda, dipersatukan ke dalam sebuah ruang manifesto politik sebagai upaya melegalkan tujuan bersama. Ruang manifesto politik disebut penulis sebagai ruang nasionalisme yang sakral. Oleh karena proses pembentukannya tetap menggunakan pola yang lama dan tanpa meninggalkan nilai Sakralitas-Nasionalisme pada fase pertama. Secara nyata, fase transisi tidak beralih bentuk, namun justru semakin kuat.

Fase ketiga merupakan fase pergerakan sakralitas-nasionalisme Papua. Fase ini berkembang setelah hancurnya impian untuk mendirikan sebuah negara merdeka pasca 1 Desember 1961 dan bergerak hingga kini (Osborne, 2001; Suryawan, 2013, Hutubessy, 2016). Aktivitas pergerakannya selalu bersifat ekspresif dan masif dengan menggunakan atribut bendera Bintang Kejora sebagai simbol perlawanan dan penegasan identitas nasionalismenya. Identifikasi dalam fase pergerakan sakralitas-nasionalisme bangsa Papua dapat disusun dalam tabel berikut ini:

Aksi Gerakan	Aktor	Lokasi	Tahun
Proklamasi kemerdekaan Papua dan aksi protes terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)	Seth Jacob Runkorem, Jacob Prai, Dorinus Mauray, Philemon Tablamelina Jerisetou Jufuway, Louis Wajoi	Waris	1971
Aksi pengibaran bendera dan rencana penyerbuan kantor Gubernur	Persila Yakadewa, Barbalina Ikari, Merry Yarona, Vonny Yakadewa, Renny Yakadewa, dan Domingas Fisirewa-Yakadewa	Kantor Gubernur	1980
Penyerangan dan percobaan pembebasan tahanan KOPKAMTIB	Tidak diketahui	Penjara Abepura	1981
Mengibarkan bendera bintang kejora dan membacakan teks proklamasi Papua Barat	9 mahasiswa Universitas Cenderawasih	Abepura	1982
Pengibaran bendera bintang kejora	Elias Warsey, Angitta Kodam XVII Cenderawasih	Kantor DPRD Tingkat 1	1984
Proklamasi OPM dan pengibaran bendera bintang kejora	Thomas Wanggai dan 60 orang simpatisan	Jayapura	1988
Pengibaran bendera bintang kejora dan tuntutan pemisahan diri dari NKRI. Kejadian ini dikenal dengan Tragedi "Biak Berdarah"	Filep Karma dan simpatisan	Biak	1998
Bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih oleh masyarakat Nimboran	Yance Hembraing dan Mesakh Hembraing dan simpatisan	Nimboran	1999
Pengibaran Bendera Bintang Kejora	Yoas Yafle, Hans Kambuaya, Yakomina Isir, Yance Wabardon	Sorong	1999
Pengibaran Bendera Bintang Kejora	Yosepha Alomang dan Pdt. Isaac Onawame (tidak terlibat, namun menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut)	Timika	1999
Pengibaran bendera bintang kejora serentak di seluruh Tanah Papua dan tuntutan salah satunya ingin melepaskan diri dari Indonesia.	Theys Hiyo Eluay dan simpatisan	Jayapura	1999

Tabel. Daftar Aksi Gerakan Massa di Papua 1971-1999 (Sumber data sekunder peneliti)

Yang menarik, fase ini telah melakukan pola transformasi simbol dalam mempertegas dan memperkuat sakralitas-nasionalisme Papua. Pola transformasi disebabkan oleh represivitas dari pelarangan penggunaan atribut bendera Bintang Kejora oleh pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai upaya melawan negara. (Hutubessy, 2016). Dalam kenyataannya atribut ini meskipun mengalami represivitas, namun justru menjadi kecenderungan penggunaan simbol secara *fashionable*, seperti misalnya pelekatan identitas Bintang Kejora pada baju, topi, tas *noken* (tas rajut asli Papua yang terbuat dari bahan alam seperti akar kayu, anggrek dan benang), sebagai atribut tarian, dan lain sebagainya. Simbol yang bersifat *fashionable* tersebut tetap digunakan di ruang publik dan menjadi fenomena yang berbeda untuk menegaskan eksistensi pergerakan sakralitas-nasionalisme Papua.

Dengan kata lain, berbeda dengan pendapat yang diajukan oleh Pamuji (2018) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa kesadaran nasionalisme dalam pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua tersemayem sejak bergabung dengan komunitas gerakan pro-demokrasi, tidak dapat sepenuhnya mewakili fakta sejarah yang telah berlangsung di dalam periode fase sakralitas-nasionalisme bangsa Papua. Faktanya, tersemayemnya nasionalisme Papua telah sejak lama berkembang melalui tahapan ketiga fase sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Salah satu stimulusnya ialah keluarga sebagai pusat pembentukan karakter yang telah menyemai kesakralan nasionalisme sebagai orang Papua dengan cara bercerita atau melalui tradisi tutur –

yang narasinya diwarisi oleh keluarga secara turun-temurun. Di sisi lain, faktor yang semakin memperkuat “rasa’ (sense) sebagai bangsa yang berbeda (dengan sense sebagai bangsa Indonesia) ialah fenomena kekerasan secara struktural, simbolik dan fisik yang dialami baik secara langsung dan tidak langsung oleh kebanyakan orang Papua. Kesadaran yang lain juga melalui persamaan nasib bersama melalui persentuhan dengan berbagai orang Indonesia yang menjadi kelompok marginal lainnya dengan memetakan musuh bersama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sadar akan kehilangan hak asasi dan ruang demokrasi yang dibatasi, menyebabkan mereka bergerak dalam pokok perjuangannya. Dalam penelitian sebelumnya, Corputty (2007) berpendapat bahwa pola perjuangan orang Papua yang bersifat primordial dan belum mampu memobilisasi massa dengan koalisi kelompok-kelompok demokrasi lainnya telah dipatahkan dengan perkembangan terakhir yang ditemukan dalam pola perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua saat ini. Mereka justru lebih masif melakukan koalisi dan kepedulian bersama dengan komunitas lainnya. Inti dari pola Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta ialah telah tersemai dengan kuat sakralitas-nasionalisme dalam diri mereka. Sejatinya, sakralitas-nasionalisme merupakan paham yang terbentuk melalui cara dan rasa yang mendalam terhadap identitas yang berkembang dan dikembangkan dalam konteks mitologi, sejarah, agama, gaya hidup, pengalaman baik dan buruk yang menggerakkan individu dan kelompok masyarakat dalam memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar untuk dilakukan dalam kehidupan orang

Papua, khususnya oleh Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

## E. Kesimpulan

Pokok pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua memiliki hubungan sejarah perjalanan panjang pada ketiga fase perkembangan Nasionalisme ini. Faktornya berkaitan dengan ingatan kolektif terhadap gagalnya membentuk sebuah negara dan berbagai fenomena kekerasan menjadikan rasa berbeda dengan Indonesia semakin kuat. Ideologi ini kemudian tersemai melalui keluarga sebagai locus pembentukan karakter awal. Analogi sederhananya, anak-anak Papua lebih mempercayai kakeknya di rumah, daripada guru mereka di sekolah. Meskipun di dalam sistem pendidikan guru lebih dominan mengajarkan nasionalisme Indonesia di sekolah, namun pengajaran sakralitas-nasionalisme dalam keluarga lebih kuat diajarkan.

Melalui indoktrinasi ideologis tentang musuh bersama, gerakan ini secara sadar telah membentuk dengan sistematis rasa berbeda dengan Indonesia. Pada akhirnya konsep “*ke-kita-an*” melalui terminologi “kawan” dan “lawan” menjadi semakin kuat pula. Hal ini merupakan salah satu faktor kekalahan dan kegagalan negara dalam meyakinkan orang Papua untuk berbangsa dan bernegara. Sehingga, mengakibatkan pola pergerakan semakin masif melalui isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pembungkaman ruang demokrasi yang selama ini belum terselesaikan dalam kehidupan mereka.

**Daftar Pustaka**

- Arendt, H. 1962. *The Origins of Totalitarianism*. Ohio: A Meridian Book.
- Bahari, Y. 2010. "Karl Marx: Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya." *Jurnal Pemikiran Sosiologi dan Humaniora* Volume 1 (1): 6-7.
- Benny Giay dan Yafet Kambai. 2003. *Yosepha Alomang ; Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan*. Jayapura: Elsham Papis.
- Corputty, R. 2007. "Gerakan mahasiswa Papua : Studi organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta," *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djopari, J. R. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Drooglever, P. J. 2010. *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. B. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia;; Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hiariej, E. 2010. "Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14 (2): 135.
- Hutubessy, F. K. 2013. "Memimpin Diri Sendiri: Suatu Studi terhadap Pemaknaan Ungkapan Pdt. Izaak Samuel Kijne". *Tesis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Tidak dipublikasikan.
- Hutubessy, F. K. 2014. "Panggilan Untuk Membangun Solidaritas Kebangsaan dari Tanah Papua." *Pax Humana* No 23.
- Hutubessy, F. K. 2016. "Nasionalisme Eksternal dan Internal Papua." *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.
- Hutubessy, F. 2018. "Menguatnya Sakralitas Nasionalisme Papua Dalam Fenomena Kekerasan." *Jurnal Sintesa* No 128.
- J.G Sterlan dan J.A Godschalk. 1989. *Kargoisme di Melanesia*. Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya.
- Kamma, F. 1972. *Messianic Movements in The Biak-Numfor Area*. The Hague, Martinus Nijhoff.
- Locke, J. 1959. *An Essay Concerning Human Understanding. Collated and annotated by Alexander Campbell Fraser*. New York: Dover Publications.
- Meteray, B. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nonie Sharp, Markus Wonggor Kaisiepo. 1994. *The Morning Star in Papua Barat*. North Carlton: Arena Publications.
- Onim, J. 2004. *87 Tahun Sejarah Pendidikan Teologi di Tanah Papua*. Jayapura: GMT.
- Osborne, R. 2001. *Kibaran sampani Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM).
- Pamuji, R. 2018. "Nasionalisme Papua Dalam Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Rahab, A. A. 2006. "Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?" *Jurnal Penelitian Politik LIPI* No. 3.
- Senis, Y. 2013. "Globalisasi dan Kemiskinan di Papua Dalam Perspektif Gramsci." *Dinamika Sosial* No 45.
- Singh, B. 2008. *Papua Geopolitics and The quest for Nationhood*. New Jersey and London: Transaction Publisher.
- Suabey, R. S. (2017). "Analisis Fungsi dan Mitos Kuri dan Pasai Bagi Masyarakat Asli Teluk Wondama." *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa dan Sastra* Vol 1 (2): 77-78.



- Suryawan, I. N. 2013. *Jiwa Yang Patah*. Yogyakarta: Kepel Press . mahasiswa-papua-demo-di-jalan-pemuda-tuntut-8-hal-ini) Diakses 20 Oktober 2018.
- Suryawan, I. N. 2017. "Lahirnya Zaman Bahagia: Transformasi Teologi Pribumi di Tanah Papua." *Jurnal Sosiologi Walisongo* No 123. ([https://kbr.id/nusantara/072016/sampai\\_semalam\\_mahasiswa\\_papua\\_di\\_yogyakarta\\_masih\\_terima\\_perlakuan\\_rasisme/83184.html](https://kbr.id/nusantara/072016/sampai_semalam_mahasiswa_papua_di_yogyakarta_masih_terima_perlakuan_rasisme/83184.html)) Diakses 20 Oktober 2018.
- Tilly, C. 1986. *The Contentious French*. Cambridge: Harvard University Press. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809081824-20-150076/aliansi-mahasiswa-papua-gerakan-yang-kian-garang>) Diakses 3 Januari 2019
- Wanma, H. 2011. *Cahaya Yang Pudar di Bukit Peradaban Tanah Nieuw Guinea*. Jayapura: Andy Wijaya. (<http://jogja.tribunnews.com/2018/10/04/ratusan-mahasiswa-papua-adakan-aksi-damai> ;[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160718\\_indonesia\\_papua\\_yogya](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160718_indonesia_papua_yogya)) Diakses 3 Januari 2019
- Wanma, H. 2016. *Dominee Izaak Samuel Kijne ; Mengenang Hidup dan Karyanya Untuk Tanah dan Bangsa Papua (Mansinam 23 Juni 1923 - Mie, Medio September 1958)*. Yogyakarta: JW Press. ([https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4242395/mahasiswa-papua-di-yogya-mengaku-terancam-ini\\_respons-sultan](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4242395/mahasiswa-papua-di-yogya-mengaku-terancam-ini-respons-sultan)) Diakses 3 Januari 2019.
- Widjojo, M. S. 2009. *Papua Road Map, "Negotiating the Past, improving the present and securing the future"*. Jakarta: Kerjasama LIPI, yayasan Tifa dan Yayasan Obor. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>) Diakses 3 Januari 2019
- Winandi, W. 2009. "Reformasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi", dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Wonda, S. 2007. *Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat*. Jayapura: Deiyai.
- Yoman, S. S. 2007. *Pemusnahan Etnis Melanesia*. Jayapura: Cenderawasih Press.

### **Sumber lain (laman internet)**

- (<https://tirto.id/aliansi-mahasiswa-tuntut-papua-bebas-dari-kolonialisme-indonesia-cNlm>) Diakses 20 Oktober 2018
- (<https://jejaknasionalis.com/2018/10/01/lbh-malang-pembubaran-massa-aksi-mahasiswa-papua-penuh-dengan-kekerasan/>) Diakses 20 Oktober 2018
- (<http://jatim.tribunnews.com/2018/12/01/kenakan-atribut-mirip-bintang-kejora-ratusan->